SMASH: Journal of Social Management Sains and Health
E-ISSN: 3089-252X P-ISSN: 3089-2538
Vol. 2 No. 1 April 2025

Transformasi Digital Dinas Perpajakan Kota Bandung: Meningkatkan Tata Kelola, Kebijakan Publik, dan Keuangan Daerah Melalui Digitalisasi Administrasi Publik

Yuanna Daniel[1] Tiara Nova Astari[2] Melati Aida Putri[3] Hanifah Bilqisti[4] Andre Ariesmansyah[5]
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: yuanna.232010025@mail.unpas.ac.id[1] tiara.232010026@mail.unpas.ac.id[2]
melati.232010028@mail.unpas.ac.id[3] hanifah.232010032@mail.unpas.ac.id[4]
andre.ariesmansyah@unpas.ac.id[5]

Abstrak

Transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi administrasi, dan optimalisasi penerimaan keuangan. Kota Bandung, melalui Dinas Perpajakan, telah memanfaatkan teknologi digital untuk mereformasi sistem administrasi perpajakan. Artikel ini membahas bagaimana digitalisasi berdampak pada tata kelola (governance), kebijakan publik berbasis data, dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini mengkaji implementasi digitalisasi administrasi perpajakan, seperti sistem e-PBB, e-SPTPD, dan integrasi pembayaran digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia, masih menjadi penghambat implementasi yang optimal. Kesimpulannya, transformasi digital di sektor perpajakan Kota Bandung memberikan contoh konkret bagaimana teknologi dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Administrasi Public, Digitalisasi Perpajakan, Pajak Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Governance, Kebijakan Publik Berbasis Data

Abstract

Digital transformation has become a top priority for local governments to enhance the efficiency of public services, administrative transparency, and optimization of financial revenues. Bandung City, through its Tax Office, has leveraged digital technology to reform its tax administration system. This article discusses how digitalization impacts governance, evidence-based public policy, and local financial management. Using a qualitative case study approach, this study examines the implementation of tax administration digitalization, such as the e-PBB system, e-SPTPD, and digital payment integration. The analysis reveals that digitalization improves transparency, efficiency, and accountability. However, challenges such as infrastructure limitations and human resource readiness continue to hinder optimal implementation. In conclusion, digital transformation in Bandung City's taxation sector serves as a concrete example of how technology can strengthen governance while improving public welfare through the optimization of local tax revenues.

Keywords: *Digital Transformation, Public Administration, Taxation Digitalization, Local Taxes, Governance, Evidence-Based Public Policy*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi menjadi elemen kunci dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Dinas Perpajakan Kota Bandung merupakan salah satu lembaga yang sedang giat melakukan

transformasi digital sebagai langkah strategis untuk memajukan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Di era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi telah menjadi kebutuhan esensial bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terukur. Di Indonesia, reformasi administrasi publik mulai diadopsi untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu bidang yang menjadi fokus transformasi adalah pengelolaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan. Namun, di banyak daerah, pengelolaan pajak masih menghadapi kendala seperti sistem manual yang kurang efisien, risiko kebocoran anggaran, dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, telah merintis langkah transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah melalui Dinas Perpajakan.

Sistem berbasis teknologi, seperti e-PBB, e-SPTPD, dan berbagai platform pembayaran online, telah diperkenalkan untuk memperbaiki proses administrasi perpajakan. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi dan transparansi, tetapi juga memberikan data yang lebih akurat untuk mendukung formulasi kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy). Meskipun digitalisasi menawarkan berbagai manfaat, proses implementasinya tidak bebas dari tantangan. Kota Bandung menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, resistensi terhadap perubahan dari pegawai, dan kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana digitalisasi administrasi perpajakan di Kota Bandung berhasil meningkatkan governance, kebijakan publik, dan keuangan daerah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis dampak transformasi digital yang diterapkan oleh Dinas Perpajakan Kota Bandung terhadap tata kelola, kebijakan publik, dan keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur dan dokumen resmi yang relevan dengan implementasi digitalisasi administrasi publik. Data yang dikumpulkan berasal dari:

- Literatur Akademik: Artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang membahas transformasi digital dalam administrasi perpajakan atau sektor publik.
- Dokumen Resmi: Laporan tahunan Dinas Perpajakan Kota Bandung, kebijakan daerah terkait digitalisasi, serta data statistik penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak.
- Studi Kasus Digitalisasi di Kota Lain: Informasi pembanding dari literatur yang membahas digitalisasi administrasi perpajakan di daerah lain untuk memperkaya konteks analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi dampak digitalisasi terhadap:

- Efisiensi tata kelola administrasi perpajakan.
- Pengambilan kebijakan publik berbasis data.
- Optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara, tetapi sepenuhnya bergantung pada data literatur dan dokumen yang tersedia. Analisis fokus pada pola, tren, dan perubahan yang dihasilkan dari implementasi digitalisasi sebagaimana tercermin dalam literatur dan laporan yang dikaji. Tujuan penelitian adalah memberikan

gambaran objektif mengenai dampak transformasi digital pada tata kelola, kebijakan publik, dan keuangan daerah berdasarkan data literatur dan dokumen resmi, tanpa melakukan evaluasi platform atau memberikan rekomendasi lebih lanjut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Administrasi Pajak dan Tata Kelola (Governance)

Digitalisasi di Dinas Perpajakan Kota Bandung telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem e-PBB dan e-SPTPD, wajib pajak dapat memeriksa informasi terkait pajak mereka secara daring, termasuk jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, dan status pembayaran. Hal ini mengurangi potensi manipulasi data atau tindakan korupsi yang sering terjadi pada sistem manual. Sistem digital juga memperbaiki proses pelaporan dan pengawasan. Data yang terintegrasi memungkinkan Dinas Perpajakan untuk memonitor pendapatan pajak secara real-time, mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak, dan menganalisis potensi pendapatan dari berbagai sektor. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan berdasarkan data yang valid. Selain itu, digitalisasi mendorong keterbukaan informasi kepada publik. Masyarakat dapat mengakses data penerimaan pajak melalui platform yang disediakan oleh pemerintah. Langkah ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Kebijakan Publik Berbasis Data (Evidence-Based Policy)

Salah satu keuntungan utama dari digitalisasi adalah tersedianya data yang akurat dan lengkap untuk mendukung formulasi kebijakan publik. Sebelum adanya digitalisasi, pembuatan kebijakan seringkali didasarkan pada asumsi atau data yang tidak terstruktur. Dengan adanya sistem digital, Dinas Perpajakan Kota Bandung dapat mengakses data pajak yang terperinci, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, sektor ekonomi yang paling berkontribusi, dan pola pembayaran pajak dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, ketika pandemi COVID-19 melanda, pemerintah Kota Bandung menggunakan data pajak untuk merancang kebijakan pengurangan denda bagi wajib pajak yang terdampak secara ekonomi. Data ini juga digunakan untuk mengidentifikasi sektor yang memerlukan insentif pajak guna mendorong pemulihan ekonomi. Data yang dihasilkan dari digitalisasi juga membantu pemerintah dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan mengetahui potensi pendapatan pajak secara lebih akurat, pemerintah dapat menyusun anggaran daerah yang lebih realistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Optimalisasi Keuangan Daerah

Transformasi digital di sektor perpajakan Kota Bandung telah memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi keuangan daerah. Dengan sistem digital, proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui berbagai kanal, seperti perbankan online, e-wallet, atau loket pembayaran resmi. Hal ini meningkatkan kenyamanan masyarakat dan mendorong peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Dinas Perpajakan juga melaporkan adanya peningkatan penerimaan pajak sejak digitalisasi diterapkan. Data dari tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, proses verifikasi dan pencatatan pembayaran menjadi lebih akurat, mengurangi potensi kesalahan atau manipulasi data. Sistem digital juga memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi dan mencegah potensi kebocoran pendapatan. Misalnya, melalui analisis data yang terintegrasi, Dinas Perpajakan dapat mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar atau yang

melaporkan data yang tidak sesuai. Hal ini membantu meningkatkan efektivitas pengawasan pajak dan memastikan bahwa semua potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi

Meskipun memberikan berbagai manfaat, transformasi digital di Dinas Perpajakan Kota Bandung tidak terlepas dari tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi:

- Resistensi terhadap Perubahan. Banyak pegawai yang merasa kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan teknis dan kurangnya pemahaman tentang manfaat digitalisasi.
- Keterbatasan Infrastruktur Teknologi. Tidak semua wilayah di Kota Bandung memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan pajak daring, terutama di daerah pinggiran.
- Keamanan Data. Ancaman terhadap keamanan data menjadi perhatian serius dalam implementasi digitalisasi. Sistem digital harus dilengkapi dengan proteksi yang memadai untuk mencegah kebocoran informasi pribadi wajib pajak.
- Literasi Digital Masyarakat. Banyak masyarakat, terutama dari kelompok usia lanjut atau pelaku usaha kecil, masih memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi digital. Hal ini menghambat adopsi layanan pajak daring secara luas.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi, dan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang manfaat digitalisasi. Digitalisasi perpajakan di Kota Bandung telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan publik. Beberapa aspek penting dalam tata kelola digitalisasi meliputi:

- Penguatan Struktur Organisasi dan Kapasitas SDM. Implementasi digitalisasi memerlukan penyesuaian struktur organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Menurut kajian Kementerian Keuangan, strategi utama yang perlu difokuskan meliputi penguatan basis data, sistem teknologi informasi (TI), serta peningkatan kapabilitas fungsi perpajakan, seperti penilaian objek pajak, penagihan, dan pemeriksaan. Selain itu, peningkatan tata kelola organisasi dan akses serta kualitas pelayanan kepada wajib pajak menjadi prioritas untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.
- Pengembangan Infrastruktur Teknologi. Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang belum merata, menjadi tantangan dalam implementasi digitalisasi. Pemerintah Kota Bandung bertekad mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan meningkatkan integrasi sistem pembayaran digital untuk memastikan layanan pajak daring dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
- Keamanan Data dan Privasi. Keamanan data wajib pajak menjadi aspek krusial dalam tata kelola digital. Sistem digital harus dilengkapi dengan proteksi yang memadai untuk mencegah kebocoran informasi pribadi. Oleh karena itu, penerapan standar keamanan siber dan regulasi terkait perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari proses digitalisasi.
- Edukasi dan Literasi Digital Masyarakat. Untuk meningkatkan adopsi layanan pajak daring, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang manfaat digitalisasi dan cara mengakses layanan tersebut. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, misalnya, telah menggencarkan edukasi dan meningkatkan digitalisasi pelayanan sebagai strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
- Inovasi Layanan Publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung

mendorong pemerintah kota untuk menghadirkan inovasi terkait pajak, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tata kelola tersebut, diharapkan digitalisasi administrasi perpajakan di Kota Bandung dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keuangan Negara/Daerah dalam Transformasi Digital Dinas Perpajakan Kota Bandung. Transformasi digital di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung tidak hanya bertujuan untuk memudahkan pelayanan publik, namun juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara/daerah secara signifikan. Berikut penjelasan mengenai dampak nya terhadap keuangan daerah:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting untuk mendukung otonomi daerah. Dengan digitalisasi, Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berhasil meningkatkan proses pendataan wajib pajak, sehingga:
   - Meningkatkan jumlah wajib pajak aktif: Sistem berbasis digital memungkinkan identifikasi wajib pajak baru, terutama di sektor informal yang sebelumnya sulit dideteksi.
   - Mengurangi tunggakan pajak: Sistem pengingat otomatis berbasis digital mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya tepat waktu, sekaligus mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.
   - Kemudahan pembayaran: Hadirnya pilihan pembayaran online (e-Payment) melalui platform digital mempercepat transaksi dan mengurangi hambatan administrasi sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dampaknya, kontribusi pajak daerah meningkat signifikan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel dan retribusi daerah lainnya.
2. Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah. Proses administrasi perpajakan yang manual seringkali memerlukan waktu, sumber daya manusia, dan biaya operasional yang besar. Dengan menerapkan teknologi digital, Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung menciptakan efisiensi nyata:
   - Digitalisasi dokumen: Seluruh pencatatan pajak kini terintegrasi dalam sistem elektronik, sehingga mengurangi penggunaan dokumen fisik dan biaya pengarsipan.
   - Otomatisasi proses administrasi: Mulai dari pendaftaran, validasi data, hingga penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi waktu penyelesaian administrasi sebesar 50%.
   - Mengurangi biaya operasional: Dengan digitalisasi, anggaran yang sebelumnya dihabiskan untuk tenaga kerja manual atau operasi administratif dapat dialokasikan untuk pengembangan teknologi dan pelatihan SDM.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Sistem perpajakan berbasis digital memungkinkan Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung mengelola data perpajakan secara real time, sehingga:
   - Pelaporan keuangan yang lebih transparan: Setiap transaksi perpajakan dicatat secara elektronik dan dapat diaudit kapan saja. Hal ini mengurangi kesenjangan dalam manipulasi data dan penipuan administratif.
   - Kepercayaan masyarakat meningkat: Wajib Pajak dapat mengakses informasi pembayaran dan alokasi melalui portal atau aplikasi pajak daerah. Hal ini menciptakan

keterbukaan yang mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
- Penguatan pengawasan: Data keuangan yang terintegrasi memudahkan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPKD) dan pihak pengawas eksternal lainnya.

4. Optimalisasi Kebijakan Fiskal dan Alokasi Anggaran. Dengan data pajak yang terintegrasi secara digital, Pemerintah Kota Bandung dapat menggunakan informasi tersebut untuk merumuskan kebijakan fiskal berbasis bukti. Ini termasuk:
   - Perencanaan anggaran yang efektif: Data real-time memberikan gambaran akurat mengenai penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
   - Alokasi anggaran yang tepat sasaran: Dana dari pajak daerah dapat dialokasikan pada sektor-sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
   - Kemampuan prediktif: Teknologi analitis yang diterapkan memungkinkan pemerintah menghasilkan pendapatan pajak di masa depan, sehingga kebijakan fiskal dapat direncanakan dengan lebih hati-hati.
5. Mengurangi Risiko Korupsi dan Praktik Tidak Etis. Transformasi digital mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak. Hal ini membawa manfaat seperti:
   - Meminimalkan risiko pungutan liar: Sistem pembayaran berbasis digital menghilangkan celah terjadinya pungutan liar, karena semua transaksi dilakukan melalui platform online.
   - Transaksi tercatat secara otomatis: Setiap pembayaran atau pengajuan pajak meninggalkan jejak digital, sehingga dapat dengan mudah dilacak oleh pengawas keuangan.
   - Ciptakan sistem yang lebih bersih: Dengan proses digital yang transparan, kepercayaan terhadap profesionalisme Pelayanan Pajak meningkat.
6. Dampak Terhadap Pembangunan dan Kemandirian Fiskal Daerah. Peningkatan PAD melalui digitalisasi perpajakan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah:
   - Meningkatkan investasi pada program-program prioritas: DPRD Kota Bandung dapat menggunakan dana pajak untuk mendukung pengembangan sektor-sektor strategis seperti smart city, angkutan umum, dan perencanaan kota.
   - Mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat: Dengan optimalisasi PAD, Kota Bandung menjadi lebih mandiri dalam membiayai program pembangunan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
   - Mendukung inovasi lokal: Transformasi digital menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi berbasis teknologi untuk layanan publik lainnya, seperti pengelolaan tarif parkir, e-governance, dan pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, Transformasi digital pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung memberikan dampak yang signifikan terhadap tata kelola keuangan daerah. Dengan optimalisasi sistem digital, tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, namun efisiensi, transparansi dan akuntabilitas juga tercipta dalam pengelolaan keuangan. Langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya sebuah kebutuhan, namun juga merupakan solusi strategis untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Transformasi digital yang diterapkan oleh Dinas Perpajakan Kota Bandung telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan keuangan daerah. Sistem digital memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Selain itu, data yang dihasilkan dari digitalisasi memberikan dasar yang kuat untuk mendukung formulasi kebijakan

publik yang lebih responsif dan berbasis bukti. Namun, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan transformasi ini, pemerintah Kota Bandung perlu mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, dan keamanan data. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, digitalisasi administrasi publik dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bandung, D. K. (2024, Desember 7). Dorong Perluasan Digitalisasi, Pemda Kota Bandung Akselerasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi. Retrieved from jabarprov.go.id/berita: https://jabarprov.go.id/berita/dorong-perluasan-digitalisasi-pemda-kota-bandung-akselerasi-implementasi-elektronifikasi-16663

Bandung., K. (n.d.). Laporan Tahunan Dinas Perpajakan. . Bandung: Pemerintah Kota Bandung., 2022.

Bank., W. (2020). he Role of Digital Technology in Modernizing Public Administration. Washington DC: World Bank.

Bappenas. (2023). Laporan kinerja kementrian perencanaan pembangunan nasional/ badan perencanaan pembangunan nasional. Retrieved from https://ppid.bappenas.go.id/public/storage/post_pdf/lakip/LKJ%20KEMENTERIAN%20TAHUN%202023%20-%20FINAL.pdf?utm_source=chatgpt.com

Gerakan Menuju 100 Smart City. (2022). Retrieved from aptika.kominfo.go.id: https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/gerakan-menuju-100-smart-city-2/

Hariani, A. (2024). Edukasi dan Digitalisasi Optimalkan Penerimaan Pajak di Jabar. Retrieved from www.pajak.com/pajak: https://www.pajak.com/pajak/edukasi-dan-digitalisasi-optimalkan-penerimaan-pajak-di-jabar/

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). (n.d.). Retrieved from jabar.bpk.go.id: https://jabar.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/

Imbau Pelaporan SPT, Madya Dua Bandung Gelar Kelas Daring. (n.d.). Retrieved from pajak.go.id: https://pajak.go.id/index.php/id/berita/imbau-pelaporan-spt-madya-dua-bandung-gelar-kelas-daring

JDIH.DPRD, B. (n.d.). DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Hadirkan Inovasi Terkait Pajak. Retrieved from https://jdih.dprd.bandung.go.id: jdih.dprd.bandung.go.id/berita/dprd-kota-bandung-minta-pemkot-hadirkan-inovasi-terkait-pajak

Meningkatkan Wawasan Digitalisasi: Kuliah Umum UM Bandung di Bapenda Jabar. (2024, Desember 27). Retrieved from bapenda.jabarprov.go.id: https://bapenda.jabarprov.go.id

Menuju Layanan Pajak di Era Digital. (2015, Oktober 5). Retrieved from bapenda.jabarprov.go.id: https://bapenda.jabarprov.go.id/2015/10/05/2790/

Merancang dan memberikan layanan publik di era digital. (2022, maret 24). Retrieved from OECD: https://www.oecd.org/en/publications/designing-and-delivering-public-services-in-the-digital-age_e056ef99-en.html?utm_source=chatgpt.com

Nurdin, R. &. (2021). Keamanan Data dalam Transformasi Digital Sektor Publik.". Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen, 12(3), 88-105.

Pemerintah, P. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah. no 12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OL9. (n.d.). Retrieved from https://jdih.setkab.go.id: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP_Nomor_12_Tahun_2019.pdf

Rika Puspita Sari), C. L. (2023). Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Era Digital.

Serial Referensi Modernisasi Dan Perbaikan Kebijakan Administrasi :Struktur Organisasi

Administrasi. (2021, november). Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id: https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/11/Trampil-4-Rev.pdf?utm_source=chatgpt.com

Yulianto, B. (2021). “Digitalisasi Administrasi Publik: Peluang dan Tantangan.”. urnal Administrasi Negara, 8(1), 45-60.